

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2021



DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN

Jl. Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116

Telp. (031) 3095361

Email : dinsos@bangkalankab.go.id

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 merupakan dokumen sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja PD sampai semester 1 tahun berjalan, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah serta Penutup yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2021, untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu serta perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, 5 Agustus 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN



WIBAGIO SUNARTA, S.Sos.MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19730126 199302 1001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
 Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN	 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Semester 1 Tahun Berjalan Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	 5
 Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 19
3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2021 Dinas Sosial	19
 BAB IV PENUTUP	 30

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kinerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya akan diproses menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan). RKA Perubahan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD dan Renstra yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan evaluasi kinerja di tahun sebelumnya dan diharapkan bisa memicu kinerja pada tahun yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja 2020 Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahab Kedua Atas Peraturan Mengeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- g. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 209 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E);
- l. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 7/E);
- m. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 25/E);
- n. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 41 tahun 2016 kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2021 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja 2021 yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 serta evaluasi kinerja di tahun 2021 dapat memicu pada rencana kerja tahun yang akan datang.

2. Memberikan arah pembangunan urusan Sosial di Kabupaten Bangkalan selama 1 (satu) tahun kedepan.
3. Membantu dalam mencapai visi dan misi Dinas Sosial dan Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, RENSTRA 2019-2023 dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) 2021 maka dapat ditetapkan Sistematika penulisan dengan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

Menggambarkan kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi Renja Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Semester I Tahun Berjalan Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Dinas Sosial
Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan (output) s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2021 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1.06	Urusan Sosial									
1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar, disabilitas dan lansia bermasalah sosial yang terlayani	3,1	3,47 %	2,7 %	69,1 %	2557,85	2,8 %	75 %	24,3
1.06.01.16.14	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia	Jumlah anak terlantar dan lansia yang terlayani dan di rehab	320	58 orang	3634 orang	3634 orang	100,00	64 orang	3.756 orang	11,7
1.06.01.16.15	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial	Jumlah tuna sosial dilayani dan direhabilitasi	635	161 orang	60 orang	18 orang	30,00	127 orang	306 orang	0,5
1.06.01.16.16	Pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas	Jumlah disabilitas yang terlayani dan direhabilitasi	199	36 orang	38 orang	0 orang	0,00	40 orang	76 orang	0,4
1.06.01.23	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0,6	0,5 %	0,6 %	3 %	6,62	0,6 %	4 %	6,0

1.06.01.23.0 1	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin yang dibina	663	120 orang	0 orang	0 orang	#DIV/0!	132 orang	252 orang	0,4
		Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3.481	1.260 orang	1329 orang	1329 orang	100,00	695 orang	15.248 orang	4,4
		Dokumen penerima rastra	5	2 dok	1 dok	1 dok	100,00	1 dok	4 dok	0,8
1.06.01.23.0 2	Kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah sarana yang dipelihara	5	2 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100,00	1 lokasi	4 lokasi	0,8
		Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	2 keg	4 keg	2 keg	0 keg	0,00	2 keg	6 keg	#VALUE!
1.06.01.23.0 3	Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber daya sosial	Jumlah lembaga yang dibantu	28	0 yayasan	0 yayasan	0 yayasan	#DIV/0!	6 yayasan	6 yayasan	0,2
		Jumlah TKSK yang terbina	90	36 orang	18 orang	18 orang	100,00	18 orang	72 orang	0,8
1.06.01.23.0 4	Pelestarian terhadap nilai-nilai kepahlawanan	peserta sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan	216	0 orang	100 orang	0 orang	0,00	50 orang	50 orang	0,2
1.06.01.24	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100	153,54 %	100 %	53,54 %	100	100 %	307 %	3,1
1.06.01.24.0 1	Perlindungan sosial korban bencana alam	persentase korban bencana alam yang dibantu	100%	56 %	100 %	100 %	100,00	100 %	256 %	256,0
		Jumlah daerah rawan bencana kekeringan yang dibantu	445	98 desa	89 desa	38 desa	42,70	89 desa	225 desa	0,5
1.06.01.24.0 2	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dokumen penerima KPM	5	2 dok	1 dok	1 dok	100,00	1 dok	4 dok	0,8
		Data kemiskinan	5	2 dok	1 dok	0 dok	0,00	1 dok	3 dok	0,6
1.06.01.24.0 3	Perlindungan sosial korban bencana sosial	% korban bencana sosial yang dibantu	100%	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	300 %	300,0

1.06.01.25	Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	6	6 %	6 %	0 %	0	6 %	12 %	2,0
1.06.01.25.01	Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah LKS yang dibantu	28	5 lembaga	5 lembaga	0 lembaga	0,00	6 lembaga	11 lembaga	0,4
1.06.01.25.02	Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial	Jumlah PSM yang telah dibina	277	180 org	80 org	0 org	0,00	55 org	235 org	0,8
1.06.01.25.03	Pengembangan Kerja sama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang dibina	110	70 org	50 org	0 org	0,00	22 org	92 org	0,8
00.00.16	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	100	100 %	100 %	100 %	100,0	100 %	300 %	3,0
0.00.16.01	Penyediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	35	14 jenis	7 jenis	7 jenis	7	7 jenis	28 jenis	0,8
		Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	45	18 jenis	9 jenis	9 jenis	100	9 jenis	36 jenis	0,8
0.00.16.02	Kedinasan dalam daerah dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	155	25 kali	25 kali	20 kali	80,0	30 kali	75 kali	0,5
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	380	60 kali	80 kali	65 kali	81,3	80 kali	205 kali	0,5
0.00.16.03	Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	64	2 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100,0	14 dokumen	30 dokumen	0,5
0.00.16.04	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	20	16 jenis	3 jenis	3 jenis	100,0	3 jenis	22 jenis	1,1
		Jumlah jenis prasarana aparatur yang dipelihara	5	2 unit	1 unit	1 unit	100,0	1 unit	4 unit	0,8
0.00.16.05	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	5	9 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100,0	0 Jenis	11 Jenis	2,2

		Jumlah prasarana aparatur yang diadakan	2	4 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0!	1 unit	5 unit	2,5
0.00.16.06	Peningkatan disiplin pegawai	Jumlah pakaian aparatur dan kelengkapan yang diadakan	400	0 buah	92 buah	92 buah	100,0	100 buah	192 buah	0,5
0.00.16.07	Peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar	40	5 orang	7 orang	0 orang	0,0	100 orang	105 orang	2,6
0.00.16.08	Penyusunan perencanaan dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	14	3 dokume n	3 dokume n	3 dokume n	100,0	3 dokume n	9 dokume n	0,6
		Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun (RKA dan DPA)	20	4 dokume n	4 dokume n	4 dokume n	100,0	4 dokume n	12 dokume n	0,6
0.00.16.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PD	Jumlah laporan triwulan & semesteran movev PD yang tersusun (Renja/RKPD, APBD)	46	12 laporan	8 laporan	8 laporan	100,0	8 laporan	28 laporan	0,6
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun	5	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100,0	1 laporan	4 laporan	0,8
0.00.16.10	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun per semester/prognosis/akhir tahun	2	3 dokume n	0 dokume n	0 dokume n	#DIV/0!	0 dokume n	3 dokume n	1,5
		Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulanan/semesteran	264	0 laporan	66 laporan	66 laporan	100,0	66 laporan	132 laporan	0,5
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	4	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	100,0	1 dokume n	3 dokume n	0,8
0.00.16.11	Fasilitasi peringatan hari jadi kabupaten/Provinsi	Jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi	9	2 kegiata n	0 kegiata n	0 kegiata n	#DIV/0!	2 kegiata n	4 kegiata n	0,4

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 DAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020													
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	% Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang telah dibina dan dibantu									8,93 %		
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	% Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang telah dibina dan dibantu									8,93 %		
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah (Pekerja Sosial Masyarakat) PSM yang telah dibina									55 orang		
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang dibina									18 orang		
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan hasil monitoring									1 laporan		
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibina									22 orang		
1.06.02.2.03.04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibantu									6 lembaga		

1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	% Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti									2,8 %			
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti									104 orang			
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga Anak Terlantar, Lanjut Usia yang dibimbing									64 orang			
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas yang dibimbing									40 orang			
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Laporan masyarakat miskin yang difasilitasi dalam SLRT									1 dokumen			
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	% Keluarga Tuna Sosial yang difasilitasi									100 %			

1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	Jumlah Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dibimbing									127 orang			
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	% keluarga fakmis yang terlindungi dan memiliki jaminan sosial									100 %			
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	% keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi									%			
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial									1.980 orang			
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen DTKS									1 dokumen			
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil monitoring dan evaluasi PKH									1 dokumen			
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil rekonsiliasi bansos PKH									- laporan			
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	SDM PKH yang difasilitasi									-			

1.06.06	Program Penanganan Bencana	% korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya									100 %			
1.06.06.2.01	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	% korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya									100 %			
1.06.06.2.01.01	Penyediaan makanan	Persentase korban bencana alam yang difasilitasi kebutuhan dasarnya									100 %			
1.06.06.2.01.01	Penyediaan makanan	Persentase korban bencana sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya									100 %			
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi									100 %			
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana									25 orang			
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	% Taman Makam Pahlawan yang terkelola									100 %			
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	% Taman Makam Pahlawan terpelihara									100 %			
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara									1 lokasi			
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional									2 kegiatan			
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan									100 %			

1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana									100 %			
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun									3 dokumen			
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun									2 dokumen			
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun									2 dokumen			
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun									1 dokumen			
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun									1 dokumen			
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun									1 dokumen			
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun									8 laporan			
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi									100 %			
1.06.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN									49 orang			
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									0 berkas			
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun									0 laporan			

1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun									1 laporan			
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulanan/semesteran									66 laporan			
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang terlaksana									100 %			
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun									1 laporan			
1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									14 laporan			
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana									100 %			
1.06.01.2.05.01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai									1 unit			
1.06.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									90 buah			
1.06.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun									0 laporan			
1.06.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun									0 laporan			
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan / bimtek / sosialisasi / seminar									5 orang			

1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase administrasi umum yang terlaksana									100 %			
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									44 unit			
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									19 unit			
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									165 unit			
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor									4 jenis			
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									2 jenis			
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									2 jenis			
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu									0 kali			
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									110 kali			
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersusun									0			
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana									100 %			

1.06.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan									39 unit			
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang terlaksana									100 %			
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat									2 jenis			
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									3 jenis			
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									1 jenis			
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									3 jenis			
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana									100 %			
1.06.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan									3 unit			
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan									19 unit			
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara									4 unit			

1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi									1 unit			
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi									63 unit			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk Mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai dinas daerah yang melaksanakan pembangunan di bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dituntut untuk menghasilkan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang berkualitas.

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2021 Dinas Sosial :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2021 Dinas Sosial

TUJUAN				SASARAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
		2021	Perubahan			2021	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunnya PPKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan	Jumlah PPKS	567.111	567.111	Meningkatnya pelayanan terhadap PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	8,93	8,93	

Tabel 3.2 Matrik Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Sosial

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET			PAGU			KETERANGAN	
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2021	APBD 2021	PENETAPAN PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD 2021	PENETAPAN PERUBAHAN 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar, disabilitas dan lansia bermasalah sosial yang terlayani	% Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	2,8%	2,8%	2,8%	327.481.250	681.236.750	624.007.350		
		Keg. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Keg. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah disabilitas, anak terlantar dan lansia yang terlayani dan di rehab	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	104 orang	104 orang	104 orang	154.481.250	69.225.200	42.370.000		

		Pengemis di Luar Panti Sosial											
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah anak terlantar dan lansia yang terlayani dan direhab	Jumlah anak terlantar dan lansia yang terlayani dan direhab	64 orang	64 orang	64 orang	154.481.250	69.225.200	42.370.000		
				Jumlah disabilitas yang terlayani dan direhabilitasi	Jumlah disabilitas yang terlayani dan direhabilitasi	40 orang	40 orang	40 orang					

		Keg. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Keg. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah tuna sosial dilayani dan direhabilitasi	Jumlah tuna sosial dilayani dan direhabilitasi	127 orang	127 orang	127 orang	173.000.000	612.011.550	581.637.350		
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	Jumlah tuna sosial dilayani dan direhabilitasi	Jumlah tuna sosial dilayani dan direhabilitasi	127 orang	127 orang	127 orang	74.000.000	64.045.200	33.671.000		

		Pemberian layanan Data dan Pengaduan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dokumen masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam sistem layanan rujukan terpadu (SLRT)	Dokumen masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam sistem layanan rujukan terpadu (SLRT)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	99.000.000	547.966.350	547.966.350		
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	1.996.946.831	1.229.750.900	887.485.422		
		Keg. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keg. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	% keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi	% keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi				1.996.946.831	1.229.750.900	887.485.422		
		Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	695 orang	1980 orang	4356 orang	1.839.698.700	1.153.478.050	886.162.572		
				Jumlah Fakir miskin yang dibina	Jumlah Fakir miskin yang dibina	132 orang	132 orang	0					

				Data Kemiskinan	Data Kemiskinan	1 dok ume n	1 doku men	1 doku men					
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penerima KPM	Dokumen Penerima KPM	1 dok ume n	1 doku men	1 doku men	157.248 .131	76.272. 850	1.322.8 50		
				Jumlah Penerima JKN	Jumlah Penerima JKN	1 dok ume n	1 doku men	1 doku men					
		Program Pemberdaya an Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	% Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang telah dibina dan dibantu	8,93 %	8,93%	8,93%	449.587 .500	452.59 1.045	258.31 3.950		
		Keg. Pengembang an Potensi Sumber Kesejahteraa n Sosial Daerah Kabupaten/K ota	Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS yang dibantu	% Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang telah dibina dan dibantu	8,93 %	8,93%	8,93%	449.587 .500	452.59 1.045	258.31 3.950		

		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Penerima Bansos	Dokumen Penerima Bansos	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	256.849.200	287.140.000	125.410.150		
				Jumlah PSKS yang dibina	Jumlah PSKS yang dibina	22 orang	22 orang	22 orang					
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang terbina	Jumlah TKSK yang terbina	18 orang	18 orang	18 orang	129.613.300	103.170.650	88.770.650		
		Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang dibantu	Jumlah Lembaga yang dibantu	6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga	48.125.000	47.280.395	44.133.150		

		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang telah dibina	Jumlah PSM yang telah dibina	55 orang	55 orang	0	15.000.000	15.000.000	-		
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah sarana yang dipelihara	% Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100 %	100%	100%	130.487.350	226.503.150	307.873.200		
		Keg. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Keg. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah sarana yang dipelihara	% Taman Makam Pahlawan terpelihara	100 %	100%	100%	130.487.350	226.503.150	307.873.200		
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah sarana yang dipelihara	Jumlah sarana yang dipelihara	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	49.543.300	136.621.500	136.621.500		
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	80.944.050	89.881.650	171.251.700		

		Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	% korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	% korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100%	100%	275.000 .000	384.89 1.475	318.81 5.828		
		Keg. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/k ota	Keg. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	% korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	% korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100 %	100%	100%	188.050 .000	261.25 8.375	195.18 2.728		
		Penyediaan Makanan	Penyediaan Makanan	% korban bencana alam yang dibantu	% korban bencana alam yang dibantu	100 %	100%	100%	188.050 .000	261.25 8.375	195.18 2.728		
				% korban bencana sosial yang dibantu	% korban bencana sosial yang dibantu	100 %	100%	100%					
					Jumlah daerah rawan bencana kekeringan yang dibantu	89 desa	89 desa	89 desa					
		Keg. Penyelenggara an Pemberdaya an Masyarakat terhadap	Keg. Penyelenggara an Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan	Jumlah daerah rawan bencana kekeringan yang dibantu	Jumlah taruna siaga bencana (tagana) yang dibina	89 desa	25 orang	25 orang	86.950. 000	123.63 3.100	123.63 3.100		

		Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota	Bencana Kabupaten/kota										
		Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah daerah rawan bencana kekeringan yang dibantu	Jumlah tarunasiagabencana(t agana) yangdibina	89 desa	25 orang	25 orang	86.950.000	123.633.100	123.633.100		
	Kesekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Dinas Sosial	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Dinas Sosial	100 %	100%	100%	6.836.252.668	6.868.148.436	5.631.913.067		
		Keg. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana	100 %	100%	100%	52.500.650	38.440.750	15.900.750		
		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	28.500.650	24.942.700	6.492.700		

		Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun (RKA dan DPA)	Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun (RKA dan DPA)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2.000.000	3.371.000	2.696.000		
			Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun (RKA dan DPA)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2.000.000	3.222.650	2.547.650		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan triwulan & semesteran monev PD yang tersusun (Renja/RKPD, APBD)	Jumlah laporan triwulan & semesteran monev PD yang tersusun (Renja/RKPD, APBD)	8 laporan	8 laporan	8 laporan	15.000.000	3.696.200	956.200		
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	3.208.200	3.208.200		

		Keg. Administrasi Keuangan	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100%	100%	4.405.673.599	4.362.913.156	3.895.106.588		
		Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Semesteran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semesteran	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semesteran	66 laporan	66 laporan	66 laporan	15.000.000	5.000.000	5.000.000		
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 laporan	1 laporan	5.000.000	5.000.000	3.834.000		
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	49 orang/bulan	49 orang/bulan	4.385.673.599	4.352.913.156	3.886.272.588		
		Keg. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang terlaksana	Persentase administrasi barang milik daerah yang terlaksana	100 %	100%	100%	10.000.000	1.952.400	1.952.400		

		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 laporan	14 laporan	14 laporan	10.000.000	1.952.400	1.952.400		
		Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	203.250.000	56.621.050	30.506.850		
		Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah prasarana aparatur yang diadakan	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	1 unit	-	10.000.000	8.614.200	-		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95 buah	90 buah	90 buah	71.250.000	30.506.850	30.506.850		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan / bimtek / sosialisasi / seminar	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan / bimtek / sosialisasi / seminar	100 orang	7 orang	0	122.000.000	17.500.000	-		

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terlaksana	Persentase administrasi umum yang terlaksana	100 %	100%	100%	347.483.600	291.376.930	124.919.879		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis	44 unit	44 unit	3.887.100	3.447.800	3.447.800		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan		2 jenis	0	0	5.500.000	-	-		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 jenis	19 unit	0	29.972.300	3.550.000	-		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 jenis	165 unit	165 unit	5.680.200	4.813.950	4.813.950		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 jenis	4 jenis	4 jenis	120.824.000	116.657.900	92.217.849		

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	49.700.000	45.138.280	16.898.280		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis	2 jenis	2 jenis	4.920.000	3.240.000	3.240.000		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 kali	110 kali	1 kali	127.000.000	114.529.000	4.302.000		
		Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100 %	100%	100%	53.078.914	458.515.600	35.120.150		

		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana aparatur yang diadakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 unit	44 unit	26 unit	53.078.914	458.515.600	35.120.150		
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang terlaksana	Persentase penyediaan jasa penunjang yang terlaksana	100 %	100%	100%	1.216.475.000	1.198.638.550	1.221.215.550		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 jenis	2 jenis	2 jenis	4.975.000	5.310.000	6.660.000		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 jenis	4 jenis	4 jenis	111.000.000	105.480.300	107.880.300		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 jenis	1 jenis	1 jenis	25.000.000	51.518.250	51.518.250		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1.075.500.000	1.036.330.000	1.055.157.000		

		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana	100 %	100%	100%	547.790 .905	459.69 0.000	307.19 0.900		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 jenis	6 unit	2 unit	218.000 .000	252.00 0.000	235.15 8.000		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 jenis	1 unit	5 unit	56.000. 000	137.91 0.000	65.537. 900		
		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	Jumlah mebel yang dipelihara	1 jenis	4 unit	0	2.768.0 00	780.00 0	-		

		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi	1 unit	1 unit	0	245.890 .405	40.000. 000	-		
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi	1 jenis	3 unit	17 unit	25.132. 500	29.000. 000	6.495.0 00		
Jumlah									10.015. 755.599	9.843.1 21.756	8.028.4 08.817		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2018 – 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Bangkalan, serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan maupun dengan perangkat daerah yang membidangi fungsi lain.

Oleh karena eskalasi permasalahan sosial yang terus berkembang maka diperlukan reposisi prioritas dan arah pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangkalan, maka pada tahun 2021 lebih difokuskan pada program sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Sosial
- b. Program Rehabilitasi Sosial
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Program Penanganan Bencana

Prioritas tersebut di atas penting untuk mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2021, karena terkait dengan hal tersebut akan menimbulkan implikasi sebagai berikut :

1. Bahwa penanganan dan pelayanan sosial terhadap PMKS sesungguhnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan indeks pembangunan

manusia. Oleh karenanya peningkatan penyediaan alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan menjadi sangat strategis dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

2. Program-program penanganan PMKS pada hakekatnya merupakan upaya untuk mencegah berkembang dan mengurangi populasi PMKS sekaligus menekan eksekse yang ditimbulkan. Oleh karenanya Program tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan, terpadu dan didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai.
3. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bencana alam, bencana sosial maupun bencana teknologi perlu disiapkan sebuah sistem pengelolaan pencegahan dan penanganan bencana secara terpadu. Oleh karenanya sistem pencegahan ini melalui pengembangan manajemen pengelolaan bencana berbasis masyarakat yang salah satunya adalah pembinaan terhadap TAGANA (Taruna Siaga Bencana), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), serta penguatan kelembagaan dalam pengelolaan bencana harus dilakukan.
4. Dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan yang profesional dan manusiawi dibutuhkan dukungan sarana dan prasana yang memadai.

Selain persoalan terkait dengan program prioritas kesejahteraan sosial di atas hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa penyediaan pelayanan harus merespon perubahan paradigma dan trend permasalahan sosial yang berkembang. Oleh karena itu diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan kesejahteraan sosial harus berorientasi pada pembangunan yang berbasis masyarakat (*community base*).
2. Peningkatan kualitas aparatur dalam penyiapan pelayanan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan, korban trafficking, korban penelantaran dan eksploitasi serta kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tahun 2021 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2021.

Bangkalan,

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bangkalan

WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19730126 199302 1001